



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMANFAATAN BALAI LATIHAN KERJA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM SEKOLAH RAKYAT

Chika Agishintya

Analisis Legislatif Ahli Pertama
chika.agishintya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempersiapkan pemanfaatan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai wilayah, baik yang dikelola pusat maupun daerah, untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Langkah ini sejalan dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, pemutusan rantai kemiskinan, dan pembangunan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dari total 59 BLK tersebut, sebanyak 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah telah ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat. Sementara itu, 24 BLK lainnya masih dalam tahap evaluasi untuk penetapan lebih lanjut.

Salah satu contoh implementasi program ini dapat dilihat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi yang akan menyelenggarakan empat rombongan belajar (rombel) dengan jenjang pendidikan SD dan SMA yang masing-masing sebanyak dua rombel. Fasilitas Sekolah Rakyat di BPVP Banyuwangi dirancang untuk mendukung kegiatan belajar yang komprehensif, mulai dari sarana pembelajaran, asrama, hingga fasilitas olahraga. Ruang belajar SMA di BPVP Banyuwangi juga dirancang untuk memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan vokasi yang diselenggarakan di balai tersebut, sehingga para siswa diharapkan memiliki kompetensi terapan, berupa keterampilan vokasi dengan sertifikasi resmi yang relevan dengan dunia kerja.

Program Sekolah Rakyat bukan sekedar menjadi inisiatif pendidikan, melainkan juga wujud kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Kemnaker dan Kementerian Sosial, untuk mengintegrasikan pendidikan dengan dunia kerja. Proses rekrutmen siswa pada Sekolah Rakyat akan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial setempat, sementara Kemnaker akan memberikan dukungan dari sisi kurikulum dan fasilitas dengan menyediakan sarana pelatihan berbasis keterampilan yang tersebar di berbagai daerah.

Model pendidikan ini menitikberatkan pada penguatan keterampilan, pembangunan karakter, dan pemberdayaan berbasis gotong royong, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi katalis perubahan sosial yang berkelanjutan, mendorong kemandirian, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pemanfaatan BLK untuk program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses pendidikan formal, sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan kerja. Hal ini diharapkan dapat memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Pemanfaatan BLK sebagai basis penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis yang dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah tersedia untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia.

BLK memiliki fasilitas pelatihan vokasi yang selama ini difokuskan untuk peningkatan keterampilan kerja, sehingga kolaborasi fungsi BLK dengan kegiatan pendidikan formal dapat menciptakan sinergi antara pembelajaran akademik dan pelatihan teknis. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan kompetensi siswa yang tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada keterampilan aplikatif yang dibutuhkan pasar kerja. Namun, Optimalisasi BLK untuk program Sekolah Rakyat memerlukan pengelolaan yang komprehensif agar fungsi awal BLK tidak tereduksi. Selama ini BLK memiliki mandat utama untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas manajemen BLK dalam menjalankan dua fungsi sekaligus yakni pelatihan vokasi dan pendidikan formal. Hal ini memerlukan koordinasi dan partisipasi lintas sektor agar jadwal pelatihan dan kurikulum dapat berjalan beriringan.

Secara strategis, program ini memiliki dimensi ganda, yakni sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem, sekaligus sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing tenaga kerja nasional. Dengan dukungan pemanfaatan infrastruktur BLK yang tersebar di Indonesia, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pendidikan dan keterampilan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan BLK sebagai basis Sekolah Rakyat untuk memastikan program ini berjalan optimal dan tidak mengganggu fungsi utama BLK sebagai pusat pelatihan kerja. Sebagai komisi yang membidangi masalah ketenagakerjaan, Komisi IX melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah menyusun regulasi yang mengatur integrasi pendidikan formal dan pelatihan vokasi di BLK, termasuk standar kurikulum dan sertifikasi. Selain itu, Komisi IX juga perlu mengawasi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga pendidik, relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan industri, serta transparansi rekrutmen siswa pada program Sekolah Rakyat ini. Sedangkan terkait fungsi anggaran, Komisi IX perlu mengawal alokasi dana yang memadai untuk peningkatan kapasitas BLK, pengadaan fasilitas tambahan, dan pelatihan tenaga pengajar.

Sumber

cnnindonesia.com, 13 Agustus 2025;
kompas.com, 13 Agustus 2025;
liputan6.com, 12 Agustus 2025; dan
tempo.co, 12 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*